



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 73 /PMK.07/2011

TENTANG

KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN
DANA ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); *su*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 diperhitungkan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum daerah kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan koreksi kurang atas alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.
- (2) Rincian koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Perhitungan koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten dan kota dilakukan atas penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 setiap bulannya sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari jumlah koreksi alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). *Am*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN
DANA ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 73 /PMK.07/2011 TENTANG
KOREKSI ALOKASI DANA ALOKASI
UMUM UNTUK KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010 DALAM
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
ALOKASI UMUM DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Kab. Aceh Barat	(233.650.000)
2	Kab. Aceh Besar	(254.305.000)
3	Kab. Aceh Selatan	(230.439.000)
4	Kab. Aceh Singkil	(190.374.000)
5	Kab. Aceh Tengah	(229.397.000)
6	Kab. Aceh Tenggara	(216.881.000)
7	Kab. Aceh Timur	(241.522.000)
8	Kab. Bireun	(220.864.000)
9	Kab. Pidie	(243.108.000)
10	Kab. Simeulue	(201.032.000)
11	Kota Banda Aceh	(207.322.000)
12	Kota Sabang	(188.865.000)
13	Kota Langsa	(167.467.000)
14	Kota Lhokseumawe	(215.902.000)
15	Kab. Nagan Raya	(245.268.000)
16	Kab. Aceh Jaya	(196.883.000)
17	Kab. Aceh Barat Daya	(192.325.000)
18	Kab. Gayo Lues	(233.899.000)
19	Kab. Aceh Tamiang	(174.355.000)
20	Kab. Bener Meriah	(204.985.000)
21	Kota Subulussalam	(169.025.000)
22	Kab. Pidie Jaya	(183.573.000)
23	Kab. Asahan	(340.188.000)
24	Kab. Dairi	(240.580.000)
25	Kab. Deli Serdang	(452.435.000)
26	Kab. Tanah Karo	(264.249.000)
27	Kab. Labuhan Batu	(208.096.000)
28	Kab. Langkat	(381.117.000)
29	Kab. Mandailing Natal	(293.245.000)
30	Kab. Nias	(114.893.000)
31	Kab. Simalungun	(335.973.000)
32	Kab. Tapanuli Selatan	(248.489.000)
33	Kab. Tapanuli Tengah	(227.565.000)
34	Kab. Tapanuli Utara	(258.556.000)
35	Kab. Toba Samosir	(212.779.000)
36	Kota Binjai	(196.280.000)
37	Kota Medan	(337.550.000)
38	Kota Pematang Siantar	(197.461.000)
39	Kota Sibolga	(190.465.000)
40	Kota Tanjung Balai	(207.724.000)
41	Kota Tebing Tinggi	(181.816.000)
42	Kota Padang Sidempuan	(186.857.000)
43	Kab. Pakpak Bharat	(165.442.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
44	Kab. Nias Selatan	(268.051.000)
45	Kab. Humbang Hasundutan	(232.032.000)
46	Kab. Serdang Bedagai	(289.461.000)
47	Kab. Samosir	(213.285.000)
48	Kab. Batu Bara	(297.922.000)
49	Kab. Labuhan Batu Utara	(279.717.000)
50	Kab. Labuhan Batu Selatan	(254.404.000)
51	Kab. Padang Lawas Utara	(228.822.000)
52	Kab. Padang Lawas	(227.326.000)
53	Kota Gunung Sitoli	(52.688.000)
54	Kab. Nias Utara	(93.507.000)
55	Kab. Nias Barat	(48.634.000)
56	Kab. Limapuluh Kota	(272.605.000)
57	Kab. Agam	(260.813.000)
58	Kab. Kepulauan Mentawai	(307.963.000)
59	Kab. Padang Pariaman	(256.129.000)
60	Kab. Pasaman	(246.077.000)
61	Kab. Pesisir Selatan	(298.511.000)
62	Kab. Sijunjung	(229.114.000)
63	Kab. Solok	(269.178.000)
64	Kab. Tanah Datar	(235.960.000)
65	Kota Bukit Tinggi	(189.382.000)
66	Kota Padang Panjang	(176.237.000)
67	Kota Padang	(314.870.000)
68	Kota Payakumbuh	(187.431.000)
69	Kota Sawahlunto	(171.590.000)
70	Kota Solok	(183.183.000)
71	Kota Pariaman	(208.178.000)
72	Kab. Pasaman Barat	(273.605.000)
73	Kab. Dharmasraya	(224.102.000)
74	Kab. Solok Selatan	(205.066.000)
75	Kab. Indragiri Hilir	(221.867.000)
76	Kab. Indragiri Hulu	(109.479.000)
77	Kab. Kuantan Singingi	(120.053.000)
78	Kab. Pelalawan	(98.472.000)
79	Kab. Rokan Hulu	(61.383.000)
80	Kota Pekanbaru	(33.378.000)
81	Kab. Bintan	(35.061.000)
82	Kota Batam	(144.051.000)
83	Kota Tanjung Pinang	(127.517.000)
84	Kab. Lingga	(117.631.000)
85	Kab. Kepulauan Anambas	(247.959.000)
86	Kab. Batanghari	(194.936.000)
87	Kab. Bungo	(205.204.000)
88	Kab. Kerinci	(223.410.000)
89	Kab. Merangin	(250.912.000)
90	Kab. Muaro Jambi	(201.270.000)
91	Kab. Sarolangun	(239.809.000)
92	Kab. Tanjung Jabung Barat	(142.325.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
93	Kab. Tanjung Jabung Timur	(181.876.000)
94	Kab. Tebo	(236.243.000)
95	Kota Jambi	(195.250.000)
96	Kota Sungai Penuh	(217.601.000)
97	Kab. Lahat	(170.786.000)
98	Kab. Musi Rawas	(175.987.000)
99	Kab. Muara Enim	(186.745.000)
100	Kab. Ogan Komering Ilir	(409.611.000)
101	Kab. Ogan Komering Ulu	(175.523.000)
102	Kota Palembang	(300.848.000)
103	Kota Pagar Alam	(135.361.000)
104	Kota Lubuk Linggau	(137.567.000)
105	Kota Prabumulih	(122.291.000)
106	Kab. Banyuasin	(333.351.000)
107	Kab. Ogan Ilir	(177.897.000)
108	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	(251.287.000)
109	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	(212.113.000)
110	Kab. Empat Lawang	(174.952.000)
111	Kab. Bangka	(203.053.000)
112	Kab. Belitung	(196.872.000)
113	Kota Pangkal Pinang	(187.537.000)
114	Kab. Bangka Selatan	(224.937.000)
115	Kab. Bangka Tengah	(192.492.000)
116	Kab. Bangka Barat	(206.009.000)
117	Kab. Belitung Timur	(215.032.000)
118	Kab. Bengkulu Selatan	(190.565.000)
119	Kab. Bengkulu Utara	(233.844.000)
120	Kab. Rejang Lebong	(233.398.000)
121	Kota Bengkulu	(223.537.000)
122	Kab. Kaur	(184.914.000)
123	Kab. Seluma	(195.522.000)
124	Kab. Mukomuko	(219.804.000)
125	Kab. Lebong	(198.289.000)
126	Kab. Kepahiang	(204.981.000)
127	Kab. Bengkulu Tengah	(184.318.000)
128	Kab. Lampung Barat	(258.991.000)
129	Kab. Lampung Selatan	(331.268.000)
130	Kab. Lampung Tengah	(405.934.000)
131	Kab. Lampung Utara	(279.926.000)
132	Kab. Lampung Timur	(332.736.000)
133	Kab. Tanggamus	(238.500.000)
134	Kab. Tulang Bawang	(190.172.000)
135	Kab. Way Kanan	(230.738.000)
136	Kota Bandar Lampung	(283.025.000)
137	Kota Metro	(140.932.000)
138	Kab. Pesawaran	(270.661.000)
139	Kab. Pringsewu	(98.485.000)
140	Kab. Tulang Bawang Barat	(87.273.000)
141	Kab. Mesuji	(102.180.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
142	Kab. Bandung	(616.606.000)
143	Kab. Bekasi	(267.946.000)
144	Kab. Bogor	(747.778.000)
145	Kab. Ciamis	(458.990.000)
146	Kab. Cianjur	(572.287.000)
147	Kab. Cirebon	(524.619.000)
148	Kab. Garut	(594.521.000)
149	Kab. Karawang	(419.512.000)
150	Kab. Kuningan	(342.933.000)
151	Kab. Majalengka	(343.548.000)
152	Kab. Purwakarta	(266.708.000)
153	Kab. Subang	(370.405.000)
154	Kab. Sukabumi	(568.647.000)
155	Kab. Sumedang	(320.538.000)
156	Kab. Tasikmalaya	(466.421.000)
157	Kota Bandung	(340.353.000)
158	Kota Bekasi	(420.917.000)
159	Kota Bogor	(268.572.000)
160	Kota Cirebon	(244.504.000)
161	Kota Depok	(340.775.000)
162	Kota Sukabumi	(194.984.000)
163	Kota Cimahi	(226.781.000)
164	Kota Tasikmalaya	(239.409.000)
165	Kota Banjar	(167.338.000)
166	Kab. Bandung Barat	(404.374.000)
167	Kab. Lebak	(403.731.000)
168	Kab. Pandeglang	(382.931.000)
169	Kab. Serang	(346.285.000)
170	Kab. Tangerang	(414.544.000)
171	Kota Cilegon	(197.268.000)
172	Kota Tangerang	(275.380.000)
173	Kota Serang	(253.318.000)
174	Kota Tangerang Selatan	(104.967.000)
175	Kab. Banjarnegara	(296.892.000)
176	Kab. Banyumas	(381.452.000)
177	Kab. Batang	(257.721.000)
178	Kab. Blora	(268.261.000)
179	Kab. Boyolali	(304.434.000)
180	Kab. Brebes	(488.828.000)
181	Kab. Cilacap	(481.104.000)
182	Kab. Demak	(329.649.000)
183	Kab. Grobogan	(384.677.000)
184	Kab. Jepara	(331.789.000)
185	Kab. Karanganyar	(267.142.000)
186	Kab. Kebumen	(358.328.000)
187	Kab. Kendal	(311.723.000)
188	Kab. Klaten	(345.755.000)
189	Kab. Kudus	(276.663.000)
190	Kab. Magelang	(337.212.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
191	Kab. Pati	(344.178.000)
192	Kab. Pekalongan	(288.938.000)
193	Kab. Pemalang	(389.983.000)
194	Kab. Purbalingga	(272.058.000)
195	Kab. Purworejo	(268.427.000)
196	Kab. Rembang	(242.933.000)
197	Kab. Semarang	(281.572.000)
198	Kab. Sragen	(281.650.000)
199	Kab. Sukoharjo	(291.534.000)
200	Kab. Tegal	(393.007.000)
201	Kab. Temanggung	(266.140.000)
202	Kab. Wonogiri	(326.091.000)
203	Kab. Wonosobo	(274.727.000)
204	Kota Magelang	(178.298.000)
205	Kota Pekalongan	(198.014.000)
206	Kota Salatiga	(157.231.000)
207	Kota Semarang	(259.162.000)
208	Kota Surakarta	(201.911.000)
209	Kota Tegal	(158.378.000)
210	Kab. Bantul	(291.858.000)
211	Kab. Gunung Kidul	(291.088.000)
212	Kab. Kulon Progo	(203.873.000)
213	Kab. Sleman	(259.850.000)
214	Kota Yogyakarta	(210.112.000)
215	Kab. Bangkalan	(325.096.000)
216	Kab. Banyuwangi	(496.766.000)
217	Kab. Blitar	(352.267.000)
218	Kab. Bojonegoro	(321.635.000)
219	Kab. Bondowoso	(286.583.000)
220	Kab. Gresik	(309.142.000)
221	Kab. Jember	(583.852.000)
222	Kab. Jombang	(359.455.000)
223	Kab. Kediri	(403.817.000)
224	Kab. Lamongan	(348.698.000)
225	Kab. Lumajang	(358.899.000)
226	Kab. Madiun	(267.087.000)
227	Kab. Magetan	(262.181.000)
228	Kab. Malang	(618.062.000)
229	Kab. Mojokerto	(307.161.000)
230	Kab. Nganjuk	(324.571.000)
231	Kab. Ngawi	(307.502.000)
232	Kab. Pacitan	(244.768.000)
233	Kab. Pamekasan	(302.735.000)
234	Kab. Pasuruan	(392.458.000)
235	Kab. Ponorogo	(302.780.000)
236	Kab. Probolinggo	(377.949.000)
237	Kab. Sampang	(329.193.000)
238	Kab. Sidoarjo	(342.367.000)
239	Kab. Situbondo	(292.655.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
240	Kab. Sumenep	(353.012.000)
241	Kab. Trenggalek	(258.274.000)
242	Kab. Tuban	(305.202.000)
243	Kab. Tulungagung	(331.917.000)
244	Kota Blitar	(149.026.000)
245	Kota Kediri	(335.739.000)
246	Kota Madiun	(168.431.000)
247	Kota Malang	(311.842.000)
248	Kota Mojokerto	(202.401.000)
249	Kota Pasuruan	(180.821.000)
250	Kota Probolinggo	(199.948.000)
251	Kota Surabaya	(187.368.000)
252	Kota Batu	(195.919.000)
253	Kab. Bengkayang	(262.089.000)
254	Kab. Landak	(308.361.000)
255	Kab. Kapuas Hulu	(508.706.000)
256	Kab. Ketapang	(549.740.000)
257	Kab. Pontianak	(239.650.000)
258	Kab. Sambas	(337.039.000)
259	Kab. Sanggau	(362.385.000)
260	Kab. Sintang	(441.822.000)
261	Kota Pontianak	(272.852.000)
262	Kota Singkawang	(212.731.000)
263	Kab. Sekadau	(242.794.000)
264	Kab. Melawi	(283.653.000)
265	Kab. Kayong Utara	(242.611.000)
266	Kab. Kubu Raya	(343.844.000)
267	Kab. Barito Selatan	(284.913.000)
268	Kab. Barito Utara	(261.119.000)
269	Kab. Kapuas	(381.112.000)
270	Kab. Kotawaringin Barat	(332.355.000)
271	Kab. Kotawaringin Timur	(404.433.000)
272	Kota Palangkaraya	(229.876.000)
273	Kab. Barito Timur	(229.969.000)
274	Kab. Murung Raya	(416.602.000)
275	Kab. Pulang Pisau	(279.825.000)
276	Kab. Gunung Mas	(293.148.000)
277	Kab. Lamandau	(270.467.000)
278	Kab. Sukamara	(287.722.000)
279	Kab. Katingan	(386.725.000)
280	Kab. Seruyan	(389.857.000)
281	Kab. Banjar	(233.128.000)
282	Kab. Barito Kuala	(233.553.000)
283	Kab. Hulu Sungai Selatan	(183.905.000)
284	Kab. Hulu Sungai Tengah	(185.016.000)
285	Kab. Hulu Sungai Utara	(161.983.000)
286	Kab. Kotabaru	(287.067.000)
287	Kab. Tabalong	(174.546.000)
288	Kab. Tanah Laut	(188.044.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
289	Kab. Tapin	(169.459.000)
290	Kota Banjarbaru	(155.904.000)
291	Kota Banjarmasin	(236.278.000)
292	Kab. Balangan	(154.341.000)
293	Kab. Tanah Bumbu	(208.767.000)
294	Kab. Berau	(44.075.000)
295	Kab. Kutai Barat	(185.488.000)
296	Kab. Malinau	(320.337.000)
297	Kab. Tana Tidung	(257.665.000)
298	Kab. Bolaang Mongondow	(226.834.000)
299	Kab. Minahasa	(225.927.000)
300	Kab. Sangihe	(223.662.000)
301	Kota Bitung	(218.873.000)
302	Kota Manado	(255.993.000)
303	Kab. Kepulauan Talaud	(235.120.000)
304	Kab. Minahasa Selatan	(217.640.000)
305	Kota Tomohon	(187.797.000)
306	Kab. Minahasa Utara	(210.180.000)
307	Kota Kotamobagu	(175.500.000)
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	(191.648.000)
309	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	(212.682.000)
310	Kab. Minahasa Tenggara	(213.247.000)
311	Kab. Bolaang Mongondow Timur	(174.882.000)
312	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	(189.113.000)
313	Kab. Boalemo	(185.469.000)
314	Kab. Gorontalo	(222.544.000)
315	Kota Gorontalo	(160.656.000)
316	Kab. Pohuwato	(227.831.000)
317	Kab. Bone Bolango	(187.747.000)
318	Kab. Gorontalo Utara	(185.079.000)
319	Kab. Banggai	(325.341.000)
320	Kab. Banggai Kepulauan	(252.974.000)
321	Kab. Buol	(222.805.000)
322	Kab. Toli-Toli	(256.213.000)
323	Kab. Donggala	(271.630.000)
324	Kab. Morowali	(340.888.000)
325	Kab. Poso	(266.982.000)
326	Kota Palu	(222.761.000)
327	Kab. Parigi Moutong	(316.794.000)
328	Kab. Tojo Una Una	(241.407.000)
329	Kab. Sigi	(281.121.000)
330	Kab. Bantaeng	(182.191.000)
331	Kab. Barru	(190.683.000)
332	Kab. Bone	(315.163.000)
333	Kab. Bulukumba	(229.056.000)
334	Kab. Enrekang	(187.218.000)
335	Kab. Gowa	(264.860.000)
336	Kab. Jenepono	(214.238.000)
337	Kab. Luwu	(243.284.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
338	Kab. Luwu Utara	(281.791.000)
339	Kab. Maros	(198.122.000)
340	Kab. Pangkajene Kepulauan	(230.737.000)
341	Kab. Pinrang	(243.868.000)
342	Kab. Kepulauan Selayar	(217.412.000)
343	Kab. Sidenreng Rappang	(212.625.000)
344	Kab. Sinjai	(203.023.000)
345	Kab. Soppeng	(206.049.000)
346	Kab. Takalar	(200.316.000)
347	Kab. Tana Toraja	(201.335.000)
348	Kab. Wajo	(234.321.000)
349	Kota Pare-pare	(170.859.000)
350	Kota Makassar	(318.214.000)
351	Kota Palopo	(179.231.000)
352	Kab. Luwu Timur	(200.758.000)
353	Kab. Toraja Utara	(205.963.000)
354	Kab. Majene	(190.882.000)
355	Kab. Mamuju	(311.371.000)
356	Kab. Polewali Mandar	(238.847.000)
357	Kab. Mamasa	(206.154.000)
358	Kab. Mamuju Utara	(202.974.000)
359	Kab. Buton	(238.090.000)
360	Kab. Konawe	(261.878.000)
361	Kab. Kolaka	(286.133.000)
362	Kab. Muna	(247.368.000)
363	Kota Kendari	(217.453.000)
364	Kota Bau-bau	(200.100.000)
365	Kab. Konawe Selatan	(269.328.000)
366	Kab. Bombana	(222.374.000)
367	Kab. Wakatobi	(191.497.000)
368	Kab. Kolaka Utara	(246.636.000)
369	Kab. Konawe Utara	(281.816.000)
370	Kab. Buton Utara	(235.477.000)
371	Kab. Bangli	(196.780.000)
372	Kab. Buleleng	(274.647.000)
373	Kab. Gianyar	(204.026.000)
374	Kab. Jembrana	(219.799.000)
375	Kab. Karangasem	(225.024.000)
376	Kab. Klungkung	(202.649.000)
377	Kab. Tabanan	(220.911.000)
378	Kota Denpasar	(165.834.000)
379	Kab. Bima	(271.512.000)
380	Kab. Dompu	(222.930.000)
381	Kab. Lombok Barat	(271.213.000)
382	Kab. Lombok Tengah	(319.428.000)
383	Kab. Lombok Timur	(362.547.000)
384	Kab. Sumbawa	(306.646.000)
385	Kota Mataram	(212.961.000)
386	Kota Bima	(172.148.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
387	Kab. Sumbawa Barat	(159.741.000)
388	Kab. Lombok Utara	(215.615.000)
389	Kab. Alor	(220.696.000)
390	Kab. Belu	(257.336.000)
391	Kab. Ende	(225.567.000)
392	Kab. Flores Timur	(227.044.000)
393	Kab. Kupang	(249.213.000)
394	Kab. Lembata	(187.247.000)
395	Kab. Manggarai	(228.162.000)
396	Kab. Ngada	(199.423.000)
397	Kab. Sikka	(224.508.000)
398	Kab. Sumba Barat	(205.883.000)
399	Kab. Sumba Timur	(277.720.000)
400	Kab. Timor Tengah Selatan	(271.088.000)
401	Kab. Timor Tengah Utara	(209.379.000)
402	Kota Kupang	(221.756.000)
403	Kab. Rote Ndao	(188.734.000)
404	Kab. Manggarai Barat	(226.194.000)
405	Kab. Nagekeo	(202.417.000)
406	Kab. Sumba Barat Daya	(226.560.000)
407	Kab. Sumba Tengah	(198.703.000)
408	Kab. Manggarai Timur	(230.509.000)
409	Kab. Sabu Raijua	(48.061.000)
410	Kab. Maluku Tenggara Barat	(248.069.000)
411	Kab. Maluku Tengah	(303.952.000)
412	Kab. Maluku Tenggara	(193.253.000)
413	Kab. Buru	(220.403.000)
414	Kota Ambon	(217.110.000)
415	Kab. Seram Bagian Barat	(235.993.000)
416	Kab. Seram Bagian Timur	(214.461.000)
417	Kab. Kepulauan Aru	(285.924.000)
418	Kab. Maluku Barat Daya	(274.652.000)
419	Kota Tual	(187.116.000)
420	Kab. Buru Selatan	(222.942.000)
421	Kab. Halmahera Tengah	(209.312.000)
422	Kab. Halmahera Barat	(179.873.000)
423	Kota Ternate	(159.281.000)
424	Kab. Halmahera Timur	(210.031.000)
425	Kota Tidore Kepulauan	(179.563.000)
426	Kab. Kepulauan Sula	(220.321.000)
427	Kab. Halmahera Selatan	(290.690.000)
428	Kab. Halmahera Utara	(166.712.000)
429	Kab. Pulau Morotai	(77.929.000)
430	Kab. Biak Numfor	(270.007.000)
431	Kab. Jayapura	(336.279.000)
432	Kab. Jayawijaya	(405.570.000)
433	Kab. Merauke	(762.161.000)
434	Kab. Mimika	(220.778.000)
435	Kab. Nabire	(363.691.000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	JUMLAH
436	Kab. Paniai	(212.411.000)
437	Kab. Puncak Jaya	(451.426.000)
438	Kab. Kepulauan Yapen	(242.680.000)
439	Kota Jayapura	(289.724.000)
440	Kab. Sarmi	(488.472.000)
441	Kab. Keerom	(321.823.000)
442	Kab. Yahukimo	(475.503.000)
443	Kab. Pegunungan Bintang	(550.850.000)
444	Kab. Tolikara	(384.684.000)
445	Kab. Boven Digoel	(581.592.000)
446	Kab. Mappi	(494.850.000)
447	Kab. Asmat	(626.086.000)
448	Kab. Waropen	(359.992.000)
449	Kab. Supiori	(321.830.000)
450	Kab. Mamberamo Raya	(486.661.000)
451	Kab. Mamberamo Tengah	(341.361.000)
452	Kab. Yalimo	(343.941.000)
453	Kab. Lanny Jaya	(356.397.000)
454	Kab. Nduga	(346.300.000)
455	Kab. Dogiyai	(282.211.000)
456	Kab. Puncak	(535.863.000)
457	Kab. Intan Jaya	(139.503.000)
458	Kab. Deiyai	(72.631.000)
459	Kab. Sorong	(169.623.000)
460	Kab. Manokwari	(356.710.000)
461	Kab. Fak Fak	(353.394.000)
462	Kota Sorong	(199.916.000)
463	Kab. Sorong Selatan	(151.011.000)
464	Kab. Raja Ampat	(349.716.000)
465	Kab. Teluk Bintuni	(368.706.000)
466	Kab. Teluk Wondama	(268.846.000)
467	Kab. Kaimana	(398.573.000)
468	Kab. Tambrau	(82.381.000)
469	Kab. Maybrat	(128.794.000)
	Total Nasional	(122.137.223.000)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BUREAU AN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO